

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endang Pandamdari, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang: Litnus, 2024)
- Franky Butar Butar, *et.al, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2022)
- I D.G. Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2024)
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2020)
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964)
- Michael Edwards, *The Oxford Handbook of Civil Society*, (United State of America: Oxford University Press, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2023)
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)

Jurnal Nasional

- Abdul Hajar Anwar, "Pendidikan The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum", *Ensiklopedia Education Review*, Vol 5, No 1 (2023): 143-149. DOI: <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1876>
- Abdul Jamil Sarifuddin dan Iwan Erar Joesoef, "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia", *National Conference on Law Studies (NCOLS) 2023 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol 5, No 1 (2023): 21-30. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2678>

Adinda Agis Fitria Cahyani, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 11 (2023): 1-16. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i11.499>

Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”, *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Vol 2, No 1 (2020): 552-565. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1508>

Elviandri, *et.al*, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 31, No. 2 (2019): 252-266. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

Frendly Albertus dan Yosana Zalukhu, “Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2019): 42-56. DOI: <https://doi.org/10.31293/lg.v4i1.4421>.

Rahmat Bijak Setiawan Sapii, *et.al*, “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 11 No. 1 (2024): 88-108. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911>

Victor Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, (2012): 473-494. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk933>

Hasil Penelitian

Otis Tabuni, “Problematika Pengesampingan Kaidah dalam UU PTUN Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”. Skripsi, Salatiga: Program Studi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721)

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138)

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134)

Website/Internet

Agungnoe, “Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan”. <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>, diakses pada 25 September 2024.

Aisyah Amira Wakang, “Alasan PBNU Terima Izin Tambang”. <https://nasional.tempo.co/read/1876798/alasan-pbnu-terima-izin-tambang>, diakses pada 5 Juli 2024.

Ananda Ridho Sulistya, “Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat”. <https://bisnis.tempo.co/read/1881901/sejak-jokowi-bolehkan-ormas-keagamaankelola-izin-tambang-sejauh-ini-pbnu-yang-berminat>, diakses pada 5 Juli 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi, “Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Pengembangan Industri Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”. https://deputi3.ekon.go.id/berita/view_by_id/51, diakses pada 4 Juli 2024.

Dina Karina, “Nilai Izin Kelola Tambang sebagai Peluang, Gus Yahya: Wong Butuh, Bagaimana Lagi”. <https://www.kompas.tv/ekonomi/513369/nilai-izin-kelola-tambang-sebagai-peluang-gus-yahya-wong-butuh-bagaimana-lagi?page=all>, diakses pada 25 September 2024.

Eko Ari Wibowo, “Gereja HKBP Tolak Ambil Konsensi Izin Tambang untuk Ormas”. <https://nasional.tempo.co/read/1877481/gereja-hkbp-tolak-ambil-konsensi-izin-tambang-untuk-ormas>, diakses pada 25 September 2024.

Firda Dwi Muliawati, “Punya Harta Karun US\$ 4 Triliun, Tapi Pemasukan buat RI Cuma US\$ 47 M”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240315144838-4-522312/punya-harta-karun-us--4-triliun-tapi-pemasukan-buat-ri-cuma-us--47-m>, diakses pada 4 Juli 2024.

Ghita Intan, “Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat”. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>, diakses pada 5 Juni 2024.

Gusdurian, “Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian: Menolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan”. <https://gusdurian.net/2024/06/11/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-menolak-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan/>, diakses pada 25 September 2024.

Konsorsium Pembaruan Agraria, “Bagi-Bagi Izin Tambang buat Ormas Rawan Konflik Agraria”. <https://www.kpa.or.id/2024/05/27/bagi-bagi-izin-tambang-buat-ormas-rawan-konflik-agraria/>, diakses pada 5 Juli 2024.

- Lukman Nur Hakim, “NU Kantongi Izin Tambang Lahan Eks Grup Bakrie Seluas 26.000 Hektare”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240822/44/1793327/nu-kantongi-izin-tambang-lahan-eks-grup-bakrie-seluas-26000-hektare>, diakses pada 25 September 2024.
- Rachel Farahdiba Regar, “Ormas Keagamaan Seperti Apa yang Bisa Dapat Izin Usaha Pertambangan dari Jokowi?”. <https://bisnis.tempo.co/read/1876562/ormas-keagamaan-seperti-apa-yang-bisa-dapat-izin-usaha-pertambangan-dari-jokowi>, diakses pada 5 Juli 2024.
- Resty Woro Yuniar, “Indonesia’s Jokowi accused of ‘transactional politics’ over religious mining permits”. <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3265948/indonesias-jokowi-accused-transactional-politics-over-religious-mining-permits>, diakses pada 5 Juli 2024.
- S. Dian Andryanto, “Ormas Keagamaan yang Tegas Tolak Konsesi Izin Tambang: PGI, KWI, HKBP, dan NWDI”. <https://nasional.tempo.co/read/1878655/ormas-keagamaan-yang-tegas-tolak-konsesi-izin-tambang-pgi-kwi-hkbp-dan-nwdi>, diakses pada 25 September 2024.
- Suara Pembaruan Agraria, “Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat”. <https://www.kpa.or.id/2023/01/01/bara-konflik-agraria-ptpn-tak-tersentuh-kriminalisasi-petani-meningkat/>, diakses pada 5 Juli 2024.
- Swary Utami Dewi, “Ironi Indonesia: Kaya Sumber Daya Alam Tapi Kemiskinan Merajalela”. <https://www.forestdigest.com/detail/2553/ironi-sumber-daya-alam-indonesia>, diakses pada 4 Juli 2024.
- Tri Jata Ayu Pamestri, “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses pada 23 September 2024.
- Verda Nano Setiawan, “NU Dikasih Tambang Eks Bakrie Group, Tapi Harus Ada Setoran ke Negara”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240607163303-4-544809/nu-dikasih-tambang-eks-bakrie-group-tapi-harus-ada-setoran-ke-negara>, diakses pada 5 Juli 2024.
- Walhi, “Izin Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan: Kado Buruk Jokowi Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. <https://www.walhi.or.id/izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-kado-buruk-jokowi-pada->

[peringatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia](#), diakses pada 25 September 2024.

Kamus

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik>

